



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 340 TAHUN 2023

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 340 TAHUN 2023

TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2023

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

TAHUN ANGGARAN : 2023

A. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan				Indeks Kota Layak Huni	65	Indeks
		1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas		Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	69,06	Persen
		2.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit		Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	18,78	Persen
		3.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,93	Indeks
				2)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19,3	Persen
4.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Indeks Risiko Bencana	60,12	Indeks		
2.	Terbangunnya Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	7,69	Indeks
		5.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,2	Persen
		6.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	8,21	Persen

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN		
		7.	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1)	Rasio Gini	0,411	Koefisien		
				2)	Tingkat Kemiskinan	4,13	Persen		
				3)	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	1,06	Persen		
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	3,96	Indeks		
		3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan				Indeks Pembangunan Manusia	81,55	Indeks
		9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat		Indeks Dimensi Pendidikan	12,14	Tahun		
				10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1)	Angka Harapan Hidup	73,21	Tahun
						2)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	13,7	Persen
				11.	Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender		Indeks Pembangunan Gender	95,04	Indeks
12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat		Indeks Demokrasi	76,82	Indeks				
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas				Indeks Reformasi Birokrasi	82	Indeks		
		13.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	Indeks		
		14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	Indeks		

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1)	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 (A)	Predikat
				2)	Indeks Survei Penilaian Integritas	70	Indeks
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini
		17.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur		Indeks Sistem Merit	326	Indeks

B. PROGRAM DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Pengelolaan Persampahan	2.036.812.614.313	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Sumber Daya Air
2.	Program Pengembangan Perumahan	1.041.414.171.130	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.	Program Kawasan Permukiman	241.759.842	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	719.415.754.401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Program Penatagunaan Tanah	3.169.400.000	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	36.412.270.077	Dinas Sumber Daya Air
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	642.100.261.675	Dinas Sumber Daya Air
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.146.089.890.967	1. Dinas Bina Marga 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	508.024.445	Dinas Bina Marga
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.326.289.066	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
11.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.893.997.370.728	Dinas Perhubungan
12.	Program Pengelolaan Pelayaran	420.380.842.097	Dinas Perhubungan
13.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.330.868.397	Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	986.155.519.646	1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	26.157.029.500	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
16.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.464.739.594	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	232.176.668	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.473.117.315	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.649.920.527	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3.784.238.435	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Program Penataan Bangunan Gedung	505.707.097.998	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
22.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.279.756.601	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
23.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.771.915.109	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
24.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	731.001.621	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
25.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	44.730.715.179	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
26.	Program Pengelolaan Hutan	44.891.927.336	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
27.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
28.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
29.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
30.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.042.502.945	Dinas Lingkungan Hidup
31.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.337.765.607	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
32.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.900.687.946	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
33.	Program Penanggulangan Bencana	42.496.871.580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	277.532.602.128	Satuan Polisi Pamong Praja
35.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	539.472.926.797	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
36.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	16.141.797.968	Dinas Sumber Daya Air
37.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	818.386.446.784	Dinas Sumber Daya Air
38.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.125.783.825.752	Dinas Sumber Daya Air
39.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	45.633.621.248	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
40.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	147.456.828.381	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
41.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.812.350	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
42.	Program Pengembangan Ekspor	7.533.150.331	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
43.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.933.748.819	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
44.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	88.110.204.212	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45.	Program Pemasaran Pariwisata	97.938.678.159	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
46.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	76.816.212.615	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
47.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.189.394.639	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
48.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.652.415.216	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
49.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.743.186.491	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
50.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.001.972.217	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
51.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	633.456.146	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
52.	Program Penyuluhan Pertanian	9.762.522.453	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
53.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	24.600.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
54.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
55.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	533.159.960	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
56.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	67.749.343.086	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
57.	Program Pengembangan UMKM	145.446.189	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
58.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
59.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.169.728.791	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
60.	Program Penempatan Tenaga Kerja	41.061.013.856	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
61.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.236.791.743	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
62.	Program Hubungan Industrial	2.253.788.980	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
63.	Program Pemberdayaan Sosial	22.056.359.985	Dinas Sosial
64.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.006.384.580.097	Dinas Sosial
65.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	469.996.203.808	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
66.	Program Rehabilitasi Sosial	281.482.295.715	Dinas Sosial
67.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	987.729.953.890	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
68.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	96.429.020	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
69.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.250.994.234	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
70.	Program Penanganan Bencana	35.504.089.662	1. Dinas Sosial 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
71.	Program Pengembangan Kebudayaan	260.220.357.620	Dinas Kebudayaan
72.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	15.921.316.041	Dinas Kebudayaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
73.	Program Pengelolaan Permuseuman	74.922.223.068	Dinas Kebudayaan
74.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.765.983.665	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75.	Program Pembinaan Perpustakaan	119.663.964.460	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
76.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	966.823.420	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
77.	Program Promosi Penanaman Modal	9.326.084.662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
78.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.040.195.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	120.483.168.526	1. Biro Pemerintahan 2. Biro Kerjasama Daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
80.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.060.970.898	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81.	Program Pengelolaan Pendidikan	10.217.852.913.841	Dinas Pendidikan
82.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.134.769.817.869	Dinas Kesehatan
83.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.213.335.895.635	Dinas Kesehatan
84.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	401.154.291	Dinas Kesehatan
85.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	5.356.477.304	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
86.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1.103.223.600.789	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
87.	Program Pengendalian Penduduk	9.961.385.280	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
88.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.689.873.176	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
89.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.213.730.417	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
90.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	491.005.968	Dinas Kesehatan
91.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	21.970.177.422	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
92.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.457.176.307	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
93.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.306.769.012	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
94.	Program Perlindungan Perempuan	15.054.416.032	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
95.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	890.260.866	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
96.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.579.431.679	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
97.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.500.000	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
98.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	490.442.218.488	Sekretariat DPRD
99.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.332.879.585	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
100.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.315.049.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.416.930.740	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
102.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	9.520.566.740	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
103.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	524.395.615.875	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
104.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	12.310.448.496	1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
105.	Program Pengelolaan Kecamatan	2.420.885.788.633	1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
106.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	543.930.288.588	1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
107.	Program Pendaftaran Penduduk	59.735.708.498	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
108.	Program Pencatatan Sipil	4.435.691.702	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
109.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.204.342.728	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
110.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	299.110.281	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
111.	Program Pengelolaan Arsip	28.226.988.088	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
112.	Program Pelayanan Penanaman Modal	152.335.224.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
113.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	14.428.302.118	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
114.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.885.889.818	1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
115.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	888.924.702	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
116.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	7.287.666.007	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
117.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	15.345.376.927	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
118.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	62.440.004.711	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
119.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	523.598.830.012	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
120.	Program Penataan Organisasi	17.518.824.828	1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 2. Biro Kerjasama Daerah
121.	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.982.914.009	1. Biro Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Pembinaan BUMD
122.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	159.765.397	1. Biro Perekonomian dan Pembangunan 2. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
123.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.842.932.530	Biro Hukum
124.	Program Kesejahteraan Rakyat	358.572.577.965	1. Biro Kesejahteraan Sosial 2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
125.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11.270.964.749	Inspektorat
126.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	27.223.727.262	Inspektorat
127.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.208.311.392	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
128.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16.793.903.713	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
129.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	242.385.790.678	Badan Pendapatan Daerah
130.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.989.510.232	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
131.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	125.558.426.068	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Badan Pengelolaan Aset Daerah
132.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.317.362.355.988	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
133.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.801.464.783	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
134.	Program Kepegawaian Daerah	64.194.290.302	1. Badan Kepegawaian Daerah 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO